UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DALAM UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS, PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta)
IKHSAN BRILIANTO, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA.,
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Daftar Pustaka

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta

Agus, D. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.*Gajah Mada Unversity Press, Jokjakarta*.

Astuti, P. (t.thn.). *Politik Korupsi : Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia.*

Bahri, S. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi dan Modus Korupsi APBD di Malang Raya . *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 1.

Batubara, A. H. (2006). Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah. *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan*, 1-6.

Biklan, R. S. (1982). *Qualitative Research for Education an Introduction to Theory and Methods.* Boston: Allynan Bacon.

Bungin, B. (2008). *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Cresswell, J. (1994). *Research Design : Qualitative and Quantiative Approaches.* Thousand Oaks, CA: SAGE.

Ginting, A. M. (2014, Januari). *Ketimpangan Ekonomi Indonesia Di Tahun Politik 2014*. *Info Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13.

Hamid, E. S. (t.thn.). *Sistem Penyelenggara Negara Anti Korupsi Dan Berbasis Keadialan* .

Haryanto, S. d. (2007). *Akuntansi Sektor Publik.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, dan Pablo Zoido-Labaton. 1999. *Agregating Governance Indicators*. Washington, DC : World Bank

Moeloeng, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Moh. Nazir, P. (2003). *Metode Penelitian.* Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DALAM UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS, PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta)
IKHSAN BRILIANTO, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA.,
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *Dipresentasikan dalam The 5th International Symposiumof J ournal Antropologi Indonesia*.

Pohan, M. H. (2000). Mewujudkan Tata kelola Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era otonomi Daerah. *Disampikan pada Musyawarah Besar Pembangunan Musi Banyuasin ketiga, Sekayu, 29 September–1 Oktober 2000*.

Santoso, Jarot Tri Bowo. 2004. A*nalisis akuntabilitas dan transparansi yang dipersepsikan dengan kenyataan yang dialami lembaga donor dan penerima jasa pada LSM di Kota Surabaya*. Tesis. Universitas Airlangga

Setiawan, H. (2007). *Zona Integritas Menuju WBK atau WBK Menuju Zona Integritas?* Dipetik Februari Minggu, 2014, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: http://www.bpkp.go.id/%20/jateng/konten/1909/Zona-Integritas-Menuju-WBK-atau-WBK-Menuju-Zona-Integritas.bpkp

Shah, A. (2007). *Performance Accountability and Combating Corruption.* Washinton, DC: The World Bank.

Sinclair, A. (1995). The chameleon of accountability: F*orms and discourses.Accounting, organizations and Society*, *20*(2), 219-237.

Singarimbun, M. d. (1981). *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: LP3ES.

Utama, D. A., & Setiyani, R. (2014). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru*. Dinamika Pendidikan, 9(2).

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 52 tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 60 tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas. Sekretariat Negara. Jakarta